

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang (developing countries) dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Dalam pembangunan nasional sekarang ini, segenap kemampuan modal dan potensi dalam negara harus dimanfaatkan, disertai dengan kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu meningkatkan kemampuan ekonomi lemah. Karena di negara kita ini masyarakatnya adalah berlapis-lapis, ada masyarakat golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi tinggi atau masyarakat bermodal. Bagi mereka yang tergolong masyarakat ekonomi tinggi kehidupannya tidak ada masalah, namun bagi golongan ekonomi lemah banyak permasalahan dalam kehidupannya dan dalam pengembangan usahanya.

Dari masalah masalah yang timbul karena adanya kekurangan modal bagi kehidupannya sehari-hari, timbul keinginan mereka satu sama lain untuk mewujudkan suatu bentuk kerjasama yang diharapkan dapat membantu. “Kerjasama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama. Kegiatan inilah yang dinamakan Koperasi.”¹

Istilah Koperasi sudah lama dikenal dalam praktek, tetapi pengetahuan teoritis masyarakat umumnya masih kurang, demikian pula pengertian dan

Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Jakarta, Djambatan, hal.183.

hakekat Koperasi diperlukan penjelasan lebih jauh lagi. Koperasi telah membawa dan menunjukkan peranan yang berarti dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat.

Koperasi yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi, berasal dari kata *co* yang berarti bersama dan *operasi* yang berarti bekerja. Jadi Koperasi berarti bekerja sama, dengan melihat atau kita tinjau dari hakekat dan tujuan Koperasi, kita dapat memberikan batasan atau definisi sebagai berikut :

“Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan ke luar sebagai anggota; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”²

Orang mendirikan Koperasi bukanlah terutama untuk mendapatkan keuntungan kebendaan tetapi didorong oleh cita-cita kemanusiaan yang luhur untuk mensejahterakan anggotanya, itulah sebabnya Koperasi memiliki ciri-ciri tersendiri. Koperasi dilandasi oleh prinsip-prinsip yang tegas yang menjadi pegangan bagi Pengurus dan anggotanya, pengelolaan Koperasi harus terbuka tidak ada rahasia. Yang berhak mengambil keputusan ialah Rapat Anggota, yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

²Chaniago, Aifinal, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Penerbit Angkasa, hal.1.

Penjelasan pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, demikian pula peraturan perundangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, parsitipatif, dan berwatak sosial. Sedangkan pembinaan

Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 telah ditegaskan bahwa Pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Pemerintah juga memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan

modal baik dari anggota maupun bukan anggota. Agar Koperasi dapat mengembangkan usahanya.

Koperasi di Indonesia telah berjalan menurut perkembangan kehidupan masyarakat. Semua jenis Koperasi di Indonesia berlaku terhadapnya Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1992, karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 di Indonesia telah banyak perkumpulan Koperasi yang berdiri, maka menurut ketentuan peralihan Pasal 65 Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 dalam jangka waktu itu Koperasi-koperasi tersebut harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tersebut.

B.PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, perlu kiranya penulis membatasi masalah. Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari semakin meluasnya bahasan. Penelitian ini hanya membahas tentang Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar.

Meskipun tentang Hak dan Kewajiban Pengurus Koperasi dalam menyelenggarakan usaha yang dijalankannya tidak mendapatkan pengaturan secara baik dalam Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, akan tetapi dalam keadaan bagaimanapun masalah Hak dan Kewajiban harus dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

C.PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, dan untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas, penulis mencoba untuk merumuskan pokok masalahnya yaitu :

1. Apakah Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar ?
2. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap penelitian sudah barang tentu mempunyai tujuan yang jelas agar mempunyai arah yang pasti, untuk itu akan penulis sajikan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian jika terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar.

E.MANFAAT PENELITIAN

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Hak dan Kewajiban Pengurus Koperasi dalam mengelola suatu Koperasi, khususnya Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi para anggota Koperasi terutama para Pengurus Koperasi dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya.

F.METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kunci utama dalam suatu penyusunan skripsi. Dengan metode penelitian, maka penulis akan mendapatkan suatu data-data yang konkrit, yang dapat dipertanggungjawabkan di mana data-data tersebut sangat penulis butuhkan guna kelengkapan penyusunan skripsi.

Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis :

“Pendekatan yuridis adalah Pendekatan yang memakai peraturan hukum positif Indonesia yang dijadikan dasar bagi tindakan-tindakan tertentu, atau sebagai pedoman utama dalam perbuatan hukum oleh pelaku hukum dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis, merupakan cara untuk menemukan kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan yang diperoleh melalui cara berfikir secara rasional dari gejala-gejala sosial yang muncul di masyarakat. Dengan metode ini kebenaran akan benar-benar ditemukan dengan memberikan tafsiran.”³

³Hartijtno, Ronny, 1988, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, GHALIA INDONESIA, hal.36.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar karena Peneliti bertempat tinggal di Karanganyar.

3. Metode Pengumpulan Data

Disini penulis menggunakan penelitian langsung kepada obyeknya dengan berbagai cara yaitu :

a. Pengumpulan Data Primer (Penelitian Lapangan)

“Adalah suatu penelitian terhadap suatu permasalahan yang diajukan atau direncanakan untuk diteliti kebenaran menurut cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan penelitiannya bersumber di lapangan.”⁴

1) Observasi

“Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam arti yang luas Observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, pengamatan yang tidak langsung misalnya melalui questionnaire dan test.”⁵

2) Wawancara

“Yaitu merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.”⁶ Dalam hal ini sebagai responden adalah Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar.

⁴ Suharsini, 1987, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya, hal.17.

⁵ Hadi, Sutrisno, 1977, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Penerbit Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, hal.159.

⁶ Sangirimbuan, Masri, 1998, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia, hal.192.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data yang bersumber pada peraturan perundangan, buku-buku literatur, maupun dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, juga bahan pustaka lain yang diperlukan.

4. Metode analisa data

Dari data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data, untuk selanjutnya adalah penganalisa data.

“Analisa data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.”⁷

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu :

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”⁸

Analisa kualitatif di dalam penelitian hukum, terutama sekali bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti, dan hasil ini akan dianalisa serta dilaporkan dalam bentuk skripsi.

⁷ Moehajir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Rake Sarasin, hal.104.

⁸Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hal. 250.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah membaca skripsi, maka di dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu :

Bab satu pendahuluan, berisi tentang : latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab dua landasan teori yaitu berisi tentang pengertian Koperasi Indonesia, sejarah berdirinya Koperasi Indonesia dan perkembangannya, landasan dan fungsi Koperasi, asas dan prinsip Koperasi, hak dan kewajiban Pengurus Koperasi, bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi.

Bab tiga menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis mengemukakan data-data atau hasil penelitian tentang : gambaran Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar yang terdiri dari : sejarah PKPN, pengertian PKPN, struktur organisasi PKPN, tujuan PKPN, lapangan Usaha PKPN. Serta membahas tentang pokok-pokok permasalahan dalam penelitian yaitu : hak dan kewajiban Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar, bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Karanganyar, serta pembahasan

Bab empat penutup, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan beserta saran.